



EFEKTIFITAS SISWA SMK NEGERI 1 GIANYAR DALAM PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR (KAJIAN ANTROPOLOGI AGAMA HINDU)

Wayan Siskasari^{1*}, Gede Bagus Wira Diputra², Putu Eddy Purnomo Arta³

SMK Negeri 1 Gianyar, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Email : wayansiska123456@gmail.com

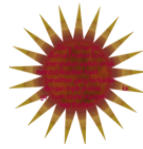
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) siswa SMK Negeri 1 Gianyar pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gianyar serta menganalisis relevansinya dengan kompetensi administrasi perkantoran dan nilai-nilai etika Hindu. Prakerin dilaksanakan selama enam bulan sebagai bentuk implementasi pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setda Gianyar memiliki peran strategis dalam koordinasi pemerintahan daerah, sehingga menjadi lingkungan belajar yang relevan bagi siswa dalam mempraktikkan keterampilan administrasi seperti pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan, koordinasi kedinasan, dan komunikasi birokrasi. Pembahasan sejarah Gianyar mengungkap keterkaitannya dengan perkembangan pemerintahan tradisional Bali serta konsep *Tri Hita Karana* sebagai filosofi harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Selain itu, struktur organisasi Setda yang bersifat lini mencerminkan prinsip tata kelola berdasarkan Dharma Negara, *Niti Śāstra*, dan tattwa rājya, yang menekankan etika kepemimpinan, hierarki, dan pembagian tugas yang jelas. Nilai-nilai Hindu seperti *Tri Kaya Parisudha*, Tat Twam Asi, dan *Tri Hita Karana* terintegrasi dalam pengalaman prakerin dan berperan membentuk karakter profesional siswa, terutama dalam aspek kedisiplinan, etika, tanggung jawab, dan hubungan interpersonal. Prakerin terbukti meningkatkan kesiapan kerja siswa melalui penguatan kompetensi teknis dan nonteknis, sekaligus menanamkan kesadaran moral dan spiritual yang relevan dengan budaya kerja Bali. Dengan demikian, kegiatan prakerin di Setda Gianyar memberikan kontribusi komprehensif dalam pengembangan profesionalitas siswa sebagai calon tenaga kerja yang unggul, beretika, dan berkarakter.

Kata kunci: Prakerin, pemerintahan daerah, etika Hindu, *Tri Hita Karana*, antropologi Agama Hindu

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Industrial Work Practice (Prakerin) program undertaken by students of SMK Negeri 1 Gianyar at the General Affairs Division of the Regional Secretariat (Setda) of Gianyar Regency, as well as to analyze its relevance to office administration competencies and Hindu ethical values. The six-month internship serves



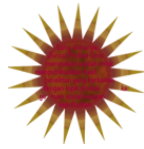
as a vocational learning model that integrates school-based theory with real work experience. This study employs a qualitative descriptive method with data collected through observation, interviews, and document analysis. The results reveal that Setda Gianyar functions as a central administrative and coordinative institution within regional governance, providing students with opportunities to practice administrative skills such as correspondence management, archiving, bureaucratic communication, and interdepartmental coordination. The historical development of Gianyar is shown to be closely linked to traditional Balinese governance and the philosophical concept of Tri Hita Karana, which emphasizes harmony between humans, nature, and the divine. In addition, the linear organizational structure of Setda reflects the principles of Dharma Negara, Nīti Śāstra, and tattwa rājya, which highlight ethical leadership, clear hierarchical structures, and proper distribution of authority. Hindu values such as Tri Kaya Parisudha, Tat Twam Asi, and Tri Hita Karana are embedded in the internship experience and contribute significantly to shaping students' professionalism, particularly in discipline, work ethics, responsibility, and interpersonal relations. Overall, the internship enhances students' technical and non-technical competencies while fostering moral and spiritual awareness aligned with Balinese work culture. Therefore, the Prakerin program at Setda Gianyar provides comprehensive support for developing competent, ethical, and character-driven future professionals.

Keywords: *Prakerin, regional government, Hindu ethics, Tri Hita Karana, Hindu religious anthropology*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan signifikan pada hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang pemerintahan dan administrasi perkantoran. Globalisasi menuntut keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, adaptif, dan profesional, karena dunia kerja semakin terintegrasi, dinamis, serta berbasis teknologi informasi (Sutrisno, 2019). Dalam konteks tersebut, tenaga administrasi tidak hanya dituntut mampu mengelola dokumen dan melaksanakan tugas clerical, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi, manajerial, penggunaan perangkat digital, serta integritas moral yang tinggi. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai institusi pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja tingkat menengah yang siap memasuki dunia industri maupun dunia pemerintahan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan vokasi bertujuan mengembangkan keterampilan terapan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja (UU No. 20 Tahun 2003).

Oleh karena itu, SMK tidak hanya bertanggung jawab pada penguasaan teori, tetapi juga memastikan bahwa peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan secara langsung dalam situasi kerja nyata (Wahyudi, 2020). Salah satu bentuk implementasi pembelajaran berbasis dunia kerja adalah Praktik Kerja Industri (Prakerin). Di SMK Negeri 1 Gianyar prakerin merupakan bagian integral kurikulum terutama pada kompetensi keahlian Manajemen Perkantoran, yang berorientasi pada penguasaan keterampilan administrasi modern. Melalui prakerin, siswa mendapatkan kesempatan untuk mengamati operasional administrasi secara langsung, memahami budaya kerja instansi, menerapkan soft skills dan hard skills, meningkatkan



daya saing profesional. Pemilihan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar sebagai lokasi prakerin didasarkan pada relevansinya dengan bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Daerah (Setda) memiliki struktur organisasi yang lengkap dan menjalankan fungsi koordinatif terhadap seluruh perangkat daerah. Selain itu, Setda merupakan pusat layanan administrasi, pengarsipan, penyusunan kebijakan, serta hubungan kelembagaan, sehingga menjadi tempat ideal bagi siswa untuk mempelajari birokrasi secara sistematis.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan metode pelaksanaan prakerin di Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar (2) Menjelaskan temuan pembelajaran mengenai sejarah instansi, visi-misi, dan struktur organisasi. (3) Mengevaluasi manfaat prakerin dalam pengembangan kompetensi administrasi siswa, (4) Mengaitkan pengalaman prakerin dengan nilai-nilai etika Hindu sebagai pembentuk profesionalisme siswa di masa depan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sekolah, dunia industri, serta pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan prakerin pada masa mendatang.

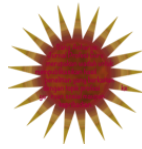
II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis pengalaman siswa SMK Negeri 1 Gianyar selama melaksanakan prakerin di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar. Kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) dilaksanakan selama enam bulan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar sebagai lingkungan kerja nyata yang relevan dengan bidang administrasi pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk mengamati aktivitas administrasi, sesuai dengan pandangan Sugiyono (2017) bahwa observasi merupakan alat pengumpulan data yang efektif untuk mengkaji perilaku dan proses kerja secara langsung. Wawancara dilakukan kepada pegawai dan pembimbing untuk memperoleh informasi mengenai tugas pokok, fungsi jabatan, serta mekanisme kerja, sejalan dengan teori Moleong (2014) yang menyatakan bahwa wawancara memungkinkan peneliti menggali data mendalam mengenai pengalaman dan pemahaman informan. Selain itu studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis mengenai sejarah, visi misi, dan struktur organisasi instansi sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2013) bahwa dokumen merupakan sumber data penting dalam penelitian deskriptif. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu proses mereduksi, mengklasifikasi, dan menyajikan data secara sistematis untuk memperoleh gambaran objektif tentang sejarah Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.

III. PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar

Sejarah pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah Kerajaan Gianyar yang berdiri pada 19 April 1771, ketika Ida Dewa Manggis Sakti mendirikan Puri Agung Gianyar sebagai pusat pemerintahan kerajaan (Pemkab Gianyar, 2025). Berdirinya keraton tersebut menandai lahirnya Gianyar sebagai kerajaan berdaulat, sekaligus pelaku utama dalam peta politik kerajaan-kerajaan di Bali. Jejak historis Gianyar jauh mendahului masa kerajaan, ditandai dengan temuan arkeologis pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan, yang menunjukkan aktivitas sosial, spiritual, dan budaya sejak lebih



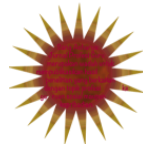
dari 2000 tahun yang lalu. Artefak berupa nekara perunggu, situs-situs pertapaan, serta relief pada dinding tebing merupakan bukti kuat adanya peradaban maju yang hidup harmonis dengan alam (Ardhana, 2005).

Transformasi Gianyar berlanjut pada masa kolonial Belanda ketika kerajaan-kerajaan di Bali ditempatkan dalam sistem pemerintahan *selfbestuur*. Setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah Gianyar mengalami perubahan struktur administrasi sesuai dengan dinamika politik nasional, mulai dari masa Republik Indonesia Serikat (RIS) hingga terbentuknya daerah tingkat II berdasarkan UU No. 69 Tahun 1958. Pada tahun 1960, untuk pertama kalinya jabatan Bupati Gianyar ditetapkan sebagai kepala pemerintahan daerah. Hal ini menjadi tonggak perkembangan birokrasi modern di wilayah Gianyar, termasuk pembentukan Sekretariat Daerah sebagai perangkat administratif utama. Keterkaitan dengan Ajaran Agama Hindu pada tataran filosofis, perjalanan sejarah Gianyar dapat dipahami melalui konsep *Tri Hita Karana*, yaitu tiga sumber kesejahteraan, yaitu: *Parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan antarmanusia), dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan alam). Eksistensi Gianyar yang kuat dalam seni, adat, dan agama merupakan manifestasi keseimbangan ketiga unsur tersebut. Situs-situs kuno di Pakerisan mencerminkan aspek *Parhyangan*, kehidupan kerajaan mencerminkan struktur *Pawongan*, sedangkan pengelolaan wilayah mencerminkan harmoni *Palemahan*. Ajaran Hindu menekankan bahwa sejarah dan peradaban berkembang melalui *ṛta* tatanan kosmis yang mengatur keteraturan alam dan sosial. Oleh karena itu, perjalanan sejarah Gianyar dapat dilihat sebagai proses menjaga *ṛta* dalam konteks pemerintahan, budaya, dan perkembangan masyarakat (Titib, 2003).

3.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gianyar

Visi Pemerintah Kabupaten Gianyar, yaitu: “Terwujudnya masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman, dan damai, mandiri, berintegritas, berlandaskan *Tri Hita Karana* melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, menunjukkan orientasi pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian budaya, dan harmonisasi lingkungan. Penerapan konsep *Tri Hita Karana* dalam visi tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada material, tetapi juga spiritual dan sosial. Konsep ini selaras dengan prinsip pembangunan Bali yang sejak lama berorientasi pada harmoni dan keberlanjutan.

Keterkaitan tersebut merupakan nilai inti dalam kosmologi Hindu Bali. Dalam konteks pemerintahan, nilai ini diterjemahkan sebagai berikut. (1) *Parhyangan*: Pemerintah menjaga nilai-nilai religius dan memberikan ruang bagi kehidupan spiritual masyarakat, (2) *Pawongan*: Pelayanan publik yang adil, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan desa adat, (3) *Palemahan*: Pengelolaan lingkungan hidup dan pertanian berkelanjutan. Enam misi pemerintah Kabupaten Gianyar yang mencakup pertanian, pariwisata berbasis budaya, pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan, pengembangan SDM, serta layanan publik, merupakan implementasi nyata dari filosofi *Tri Hita Karana* dalam konteks modern. Menurut Arthadana (2010), penerapan *Tri Hita Karana* dalam kebijakan publik terbukti meningkatkan kualitas tata kelola, menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian budaya.



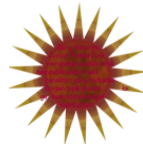
3.3. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menerapkan struktur lini, yaitu pola organisasi dengan alur komando vertikal dari pimpinan tertinggi hingga unit pelaksana terbawah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang membawahi tiga asisten: (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, (3) Asisten Administrasi Umum. Ketiga asisten tersebut mengoordinasikan berbagai bagian seperti: (1) Tata Pemerintahan dan Kerjasama, (2) Kesejahteraan Rakyat, (3) Hukum, (4) Perekonomian, (5) Administrasi Pembangunan, (6) Pengadaan Barang/Jasa, (7) Umum, (8) Organisasi, (9) Protokol dan Komunikasi Pimpinan, (10) Perencanaan dan Keuangan. Selain itu terdapat jabatan fungsional seperti Arsiparis, Auditor, dan Analis Kebijakan yang memperkuat profesionalitas pemerintahan daerah.

Dalam ajaran Agama Hindu, struktur organisasi pemerintahan bukan hanya dipandang sebagai tatanan administratif, tetapi sebagai cerminan dari tatanan kosmis yang menempatkan pemerintah sebagai pelaksana *Dharma* Negara. *Dharma* Negara merupakan kewajiban moral, spiritual, dan sosial yang diberikan kepada negara dan pemimpin untuk menjaga kebenaran (*satya*), ketertiban (*rta*), serta kesejahteraan (*hita*) seluruh rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa pemerintahan tidak sekadar menjalankan fungsi birokrasi, tetapi merupakan instrumen untuk menciptakan harmoni universal sesuai ajaran Hindu.

Ajaran Dharma Negara bersumber dari teks-teks klasik Hindu, terutama *Nīti Śāstra* yang memuat ilmu pemerintahan dan etika kepemimpinan. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pembentukan organisasi pemerintahan, seperti pentingnya pemimpin yang adil (*dharmika* raja) yang memimpin berdasarkan dharma, menegakkan keadilan, serta melindungi rakyat sambil mengutamakan kemaslahatan umum (*lokasamgraha*), sehingga pemimpin dituntut untuk jujur, bijaksana, tidak koruptif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Selain itu, *Nīti Śāstra* menekankan pembagian tugas yang jelas (*vyavasthā*), karena setiap jabatan harus memiliki peran, wewenang, dan tanggung jawab yang terstruktur demi menghindari kekacauan atau adharma, sehingga hierarki organisasi menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan (*rta*) dalam kehidupan kenegaraan. Lebih jauh, *Nīti Śāstra* menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan harus berlandaskan etika dan tanggung jawab melalui nilai-nilai seperti kejujuran (*satya*), pengendalian diri (*dama*), kesabaran (*kṣamā*), dan kepedulian (*dayā*), yang menjadikan aparatur pemerintahan sebagai pelaksana dharma pada tingkat sosial serta menjadikan integritas sebagai pilar utama dalam birokrasi.

Struktur lini yang diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar selaras dengan ajaran Hindu tentang tattwa rājya, yaitu prinsip dasar mengenai bagaimana pemerintahan seharusnya disusun dan dijalankan secara hierarkis, terkoordinasi, dan berlandaskan kewenangan yang jelas. Dalam konsep tattwa rājya, pemerintahan ideal dibangun melalui hierarki kepemimpinan yang teratur dari tingkat tertinggi hingga pelaksana teknis, sebagaimana kosmologi Hindu memandang alam semesta sebagai susunan berjenjang yang menjaga keteraturan (*rta*) (Titib, 2003).



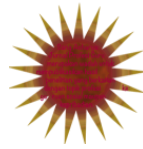
Gambar 1 : Foto Bersama Pimpinan Instansi, Guru Pembimbing dan Siswa Prakerin Selain

Selain itu, koordinasi yang baik antarsatuan organisasi merupakan keharusan, karena mencerminkan ajaran yajña sebagai bentuk kerja sama kolektif demi tercapainya kesejahteraan bersama (*lokasamgraha*) (Lansing, 2006). Pembagian kewenangan yang jelas juga menjadi prinsip utama, karena ketidakjelasan tugas dan fungsi dapat menimbulkan adharma yang mengganggu harmoni sosial; oleh sebab itu, setiap aparat pemerintahan wajib bekerja sesuai dharma, etika, dan tanggung jawab strukturalnya sebagaimana diajarkan dalam *Nīti Śāstra* (Pudja, 1997). Dengan demikian, struktur lini Sekretariat Daerah dapat dipahami tidak hanya sebagai pola birokrasi modern, tetapi sebagai manifestasi nilai-nilai Hindu tentang keteraturan, etika, dan harmoni dalam tata kelola pemerintahan.

3.4. Integrasi Nilai-Nilai Hindu Pada Prakerin dalam Perspektif Antropologi Agama Hindu

Sebagai daerah yang memiliki identitas budaya yang sangat kuat serta didominasi oleh masyarakat pemeluk Agama Hindu, kegiatan Praktik Kerja Industri (prakerin) di Kabupaten Gianyar tidak hanya menjadi proses pembelajaran teknis, tetapi juga proses internalisasi nilai-nilai spiritual dan etika Hindu yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Nilai-nilai religius ini menjadi pedoman moral yang memengaruhi cara masyarakat bekerja, bersikap, dan menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Salah satu ajaran fundamental yang relevan dalam konteks prakerin adalah *Tri Kaya Parisudha*, yaitu tiga penyucian diri melalui *manacika* (berpikir baik), *wacika* (berkata baik), dan *kayika* (berbuat baik).

Dalam lingkungan kerja di Gianyar, ajaran ini mengarahkan siswa untuk selalu menjaga kualitas pikiran agar tetap positif, jujur, dan fokus dalam menjalankan tugas. Pada tataran komunikasi, *Tri Kaya Parisudha* mendorong peserta prakerin untuk bertutur kata sopan dan santun, menghargai atasan maupun rekan kerja, serta menghindari konflik verbal yang tidak perlu. Pada tataran tindakan (*kayika*), nilai ini menekankan kedisiplinan, ketekunan, kehati-hatian, dan loyalitas terhadap tugas. Dalam kajian etika Hindu, *Tri Kaya Parisudha* merupakan dasar pembentukan karakter moral yang selaras dengan tuntutan profesional (Wiana, 2004).



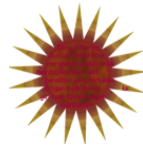
Selain itu, ajaran *Tat Twam Asi* yang berarti “aku adalah kamu, dan kamu adalah aku” menjadi prinsip spiritual yang mengajarkan empati, solidaritas, dan kesadaran akan kesatuan hidup. Dalam konteks prakerin, ajaran ini sangat relevan untuk membangun kerja sama (*teamwork*), menghindari sikap egois, serta mendorong siswa untuk menghormati pegawai senior maupun sesama peserta prakerin. Pemahaman *Tat Twam Asi* juga memperkuat sikap pelayanan (*service orientation*) yang tulus dalam menghadapi masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi. Dengan kata lain, nilai ini menumbuhkan kemampuan interpersonal, kepekaan sosial, dan sikap rendah hati dimensi yang sangat penting dalam dunia kerja sektor publik.



Gambar 2 : Kegiatan Siswa Selama Prakerin di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gianyar

Ajaran lain yang sangat mendasar adalah *Tri Hita Karana*, yaitu konsep harmoni antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan lingkungan (*Palemahan*). Dalam budaya kerja instansi pemerintah, nilai ini termanifestasi secara nyata dalam beberapa aspek. Pada tingkat *Parahyangan*, suasana religius dan kegiatan keagamaan seperti persembahyangan rutin, purnama-tilem, serta ritual tertentu di instansi, membentuk etos spiritual yang membimbing kesadaran etika dalam bekerja. Pada tingkat *Pawongan*, *Tri Hita Karana* mendorong terciptanya hubungan sosial yang penuh rasa hormat, sikap saling mendukung, serta budaya gotong royong di lingkungan kerja. Sementara itu pada tingkat *Palemahan*, nilai ini terlihat dalam upaya menjaga kebersihan kantor, kerapian arsip, pemeliharaan fasilitas, serta kepedulian terhadap lingkungan kerja secara fisik. Dalam perspektif antropologi Agama Hindu, *Tri Hita Karana* merupakan fondasi harmonisasi sosial dan spiritual yang memengaruhi perilaku manusia di semua sektor kehidupan (Windia & Dewi, 2007).

Integrasi ketiga nilai utama Hindu tersebut menjadikan kegiatan prakerin di Gianyar bukan hanya ajang pengembangan keterampilan teknis administrasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter baik moral, sosial, maupun spiritual. Siswa tidak hanya dibekali kompetensi profesional, tetapi juga nilai-nilai luhur yang membangun integritas, etika, dan tanggung jawab. Dengan demikian, prakerin menjadi wadah pendidikan holistik yang menyeimbangkan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Pendekatan holistik inilah yang membuat lulusan prakerin di Gianyar tidak hanya siap memasuki dunia kerja secara teknis, tetapi juga mampu berperilaku etis, berbudaya, dan memiliki kesadaran spiritual yang kuat dalam menjalankan profesinya.



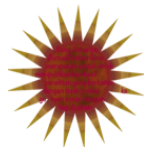
3.5. Analisis Antropologi Agama Hindu

Struktur organisasi pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dapat dianalisis melalui perspektif antropologi agama Hindu, karena pola hubungan kekuasaan, pembagian tugas, dan hierarki yang berlaku dalam birokrasi modern Bali tidak dapat dilepaskan dari warisan sosial-politik Hindu Bali. Dalam tatanan filsafat Hindu, pemerintahan ideal dijalankan berdasarkan prinsip *Dharma* Negara, yaitu dharma yang mengatur bagaimana negara dan pemimpin menjalankan tugasnya untuk menjaga kebenaran, ketertiban, serta kesejahteraan rakyat. Konsep ini tidak hanya menggambarkan fungsi administratif, tetapi juga tanggung jawab moral yang bersifat sakral. Dalam literatur klasik Hindu, prinsip Dharma Negara dijabarkan dalam *Nīti Śāstra*, yakni teks ajaran etika pemerintahan yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus menjadi dharmika raja, yaitu raja atau pejabat yang menjalankan tugasnya berdasarkan *dharma*, bukan semata-mata kekuasaan duniawi. *Nīti Śāstra* mengajarkan bahwa pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur-unsur: kepemimpinan yang adil dan bijaksana, pembagian tugas yang jelas, tanggung jawab yang proporsional, koordinasi yang harmonis, orientasi pada kesejahteraan masyarakat (*lokasamgraha*).

Nilai-nilai etis tersebut menjadi pondasi moral dalam tata kelola pemerintahan Bali tradisional, dan secara antropologis tetap tercermin dalam struktur birokrasi modern, termasuk pada tingkat kabupaten. Struktur organisasi Sekretariat Daerah Gianyar yang menggunakan model struktur lini dengan alur komando vertikal dari pimpinan tertinggi hingga unit pelaksana selaras dengan ajaran Hindu mengenai tattwa *rājya*. *Tattwa rājya* mengajarkan bahwa pemerintahan harus berjalan berdasarkan sistem hierarki yang teratur, harmonis, dan memiliki garis wewenang yang jelas. Hierarki tersebut bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi dilihat sebagai manifestasi keteraturan kosmis (*rta*) dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, struktur pemerintahan bukan hanya sistem duniawi, melainkan representasi dari tatanan sakral yang mencerminkan hubungan antara manusia, masyarakat, dan kosmos (Pudja, 1997).

Dalam perspektif antropologi agama, birokrasi modern di Gianyar dapat dipahami sebagai kelanjutan dari struktur sosial-politik kerajaan Hindu Bali yang telah mengakar selama berabad-abad. Sistem pemerintahan tradisional Bali selalu menekankan *tri mandala* (tingkatan ruang), *tri angga* (tingkatan struktur), serta konsep desa kala patra, yaitu ketepatan tindakan berdasarkan ruang, waktu, dan keadaan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam cara Sekretariat Daerah mengatur pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan hierarki jabatan. Lebih jauh, struktur pemerintahan modern Gianyar juga memperlihatkan kesinambungan dengan prinsip sacral kingship dalam tradisi Hindu Bali, di mana pemimpin dan aparat pemerintahan tidak hanya memiliki tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Hierarki yang jelas dalam struktur organisasi dianggap sebagai sarana untuk memastikan agar setiap unit dapat menjalankan dharma-nya sesuai fungsi, sehingga keseluruhan sistem tetap harmonis. Dengan demikian, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tidak hanya mencerminkan prinsip manajemen modern, tetapi

merupakan adaptasi kontemporer dari nilai-nilai Hindu Bali mengenai harmoni, hierarki, serta tanggung jawab sakral dalam menjalankan pemerintahan. Integrasi antara birokrasi modern dan nilai-nilai tradisional ini menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan di Bali, yang secara antropologis disebut sebagai bentuk continuity of tradition atau kelanjutan tradisi dalam struktur politik modern.



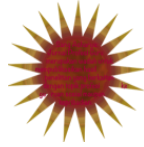
IV. SIMPULAN

Kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) di Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi siswa, khususnya dalam bidang administrasi perkantoran dan pengenalan struktur birokrasi pemerintahan. Melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas administrasi, siswa memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang sebelumnya dipelajari dalam konteks teoritik di sekolah. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis seperti pengelolaan surat-menyurat, penyusunan dokumen, komunikasi kedinasan, dan pemanfaatan teknologi perkantoran, tetapi juga meningkatkan kemampuan non-teknis seperti kedisiplinan, ketelitian, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja dalam struktur organisasi yang hierarkis. Selain itu keterlibatan dalam lingkungan pemerintahan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme kerja birokrasi, hubungan antarbagian, serta peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator administrasi dalam pemerintahan daerah. Siswa dapat mengamati secara langsung bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tugas administratif, bagaimana koordinasi antarbagian dilakukan, serta bagaimana etika kerja diterapkan dalam pelayanan publik.

Integrasi antara teori di sekolah dan pengalaman praktik di lapangan terbukti meningkatkan kesiapan profesional siswa. Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan prakerin membantu siswa membangun wawasan yang lebih luas terkait dinamika dunia kerja, mengembangkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan kerja baru, serta memperkuat etos kerja yang diperlukan untuk memasuki dunia profesional. Dengan demikian, prakerin tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kurikulum, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter, menyiapkan mental, dan meningkatkan daya saing siswa sebagai calon tenaga kerja masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I. K. (2005). *Sejarah Bali kuno dan peradaban di Pakerisan*. Udayana University Press.
- Arthadana, I. W. (2010). Implementasi Tri Hita Karana dalam kebijakan publik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 45–55.
- Lansing, J. S. (2006). *Perfect order: Recognizing complexity in Bali*. Princeton University Press.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar. (2025a). *Sejarah Kabupaten Gianyar*. <https://www.gianyarkab.go.id/profil/8/Sejarah>
- Pemerintah Kabupaten Gianyar. (2025b). *Visi dan misi Kabupaten Gianyar*. <https://www.gianyarkab.go.id/pemerintahan/2/Visi-dan-Misi>
- Pudja, G. (1997). *Nīti Śāstra: Ajaran pemerintahan dalam Hindu*. Paramita.



- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.
- Titib, I. M. (2003). *Teologi dan simbol-simbol dalam Agama Hindu*. Paramita.
- Wahyudi, A. (2020). Implementasi pendidikan vokasi dalam meningkatkan kompetensi kerja siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 10(2).
- Wiana, I. K. (2004). *Tri Kaya Parisudha dalam kehidupan*. Paramita.
- Windia, W., & Dewi, R. K. (2007). *Analisis bisnis yang berlandaskan Tri Hita Karana*. Universitas Udayana.